

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd. Rachim. 2020. *Collaborative Governance Dalam Pespektif Administrasi Negara*. 1st ed. edited by T. D. Press. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press Jalan Erlangga Barat VII No. 35 - Semarang.
- Djuadi, D. N., & Tresiana, D. N. (2017). *Kota Layak Anak yang Berkelanjutan* (M. Nizar (ed.); 1st ed.). Anugrah Utama Raharja.
- Dr. Ir. KURNIADI, M.M., M.Si., CQM. 2020. *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur*. 1st ed. yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M.Si. 2018. *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. 1st ed. CV. Budi Utama.
- Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M. . (2019). *Sistem peradilan pidana anak* (1st ed.). Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Emerson, Krik, and Tina Nabatchi. 2015. *COLLABORATIVE GOVERNANCE REGIMES*. 1st ed. in the united states of america.
- Faisal, N. S. (2018). *Hukum Perlindungan Anak* (D. Iskandar (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Prima.
- Fransiska novita eleanora, S.H., M. H., Zulkifli Ismail, S.H., M. ., Ahmad , S.Psi., S.H., M.M., M. ., & Melanie Pita Lestari, S.S., M. . (2021). *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan* (1st ed.). Mazda Media.
- Hendarman, nusa putra. 2012. *Metode Penelitian Kebijakan*. edited by N. N. Muliawati. bandung: remaja rosdakarya.
- Kamil, A., & Fauzan, H. m. (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.

- Leary, R. O. (2014). *Collaborative Governance in New Zealand: Important Choices Ahead Prepared by*. Fullbright New Zealand.
- Nursariyani, faisal simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. 1st ed. edited by D. Iskandar. CV. Pustaka Prima.
- Setiady, T., & Ridwan. (2010). *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (1st ed.). Alfabeta.
- Soemitro. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (1st ed.). Bumi aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 1st ed. bandung: bandung, Alfabeta.
- Waluyadi, S, H., M. (2009). *Hukum Perlindungan Anak* (1st ed.). CV. Mandar Maju.
- Jurnal**
- Adawiah, R. Al. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamana Nasional*, 1, 279–296.
- Adawiyah, V. R., Yayuk, A., Rahayu, S., & Indonesia, U. (2022). Analisis Aktor dan Faktor Kondisi Awal yang Mempengaruhi Collaborative Governance Program Beli Kreatif Lokal Jabodetabek. *Moderat*, 8(November), 809–825.
- Agbodzakey, J. K. (2012). *Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Counties of South Florida*. 107–126. <https://doi.org/10.1007/s11115-011-0162-7>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Jounar of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Booher, D. E. (2005). Collaborative Governance Practices and Democracy. *Wiley Online Library*, 93(4), 32–46.

- Batory, A., & Svensson, S. (2020). Regulating Collaboration: The Legal Framework of Collaborative Governance in Ten European Countries. *International Journal of Public Administration*, 43(9), 780–789. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1658771>
- Connick, Sarah & Judith Innes. (2003). Outcomes of Collaborative Water Policy Making: Applying Complexity Thinking to Evaluation. *Journal of Environmental Planning and Management*.
- Crofts, K. (2006). Are Discretionary Public Funding Models For The Australian Third Sector An Anomaly Under The New Public Management Regime? In *australia and new zealand thir sector research* (Issue November, pp. 1–25).
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Jounar of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Huzaini, A., Herdiana, D., & Miftakhul, I. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Cemaga Utara Kecamatan BUNguran Selatan Kabupaten Natuna. *Jurnal Imiah Mandala Education*, 8.
- Hodges, S., Ferreira, K., & Mowery, D. (2013). Administration in Social Work Who ' s in Charge Here ? Structures for Collaborative Governance in Children ' s Mental Health Who ' s in Charge Here ? Structures for Collaborative Governance in Children ' s Mental Health. *Administrasi in Social Work*, November 2014, 37–41. <https://doi.org/10.1080/03643107.2012.758062>
- Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. (2009). Collaborative governance and adaptive management: Lessons from California's CALFED Water Program. *Environmental Science & Policy*, 12(6), 631–643.
- Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership synergy: a practical framework for studying and strengthening the collaborative advantage. *The Milbank Quarterly*, 79(2), 179–205.

- Maknun, L. (2017). Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tuan (Child Abuse). *Madrasah Ibtidayah*, 3(1)
- Meiga Ervianti. (2018). Faktor -Faktor yang Menghambat Collaborative Governance dalam Implementasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5, 1–13.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabubak kabupaten sumba barat. *Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, VI(02), 140–148.
- Nadiya Wanti Anggraini, Dadang Mashur. 2022. “Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau Dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).” *Journal of Sosial and Policy Issues* 2:2–4.
- Ph, L., & Anggraeni, R. (2018). ;Pendidikan Kesehatan Tentang Perkembangan Psikososial Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik dan Verbal Pada Anak Usia Sekolah di Kota Kendal. *Ners Dan Kebidanan*, 5, 97–104. <https://doi.org/10.26699/jnk.v5i2.ART.p097>
- Prihatin, E., & Dewimawati, D. I. H. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9.
- Suhnyuk, Kim. (2010). Collaborative Governance in South Korea: Citizen Participation in Policy Making and Welfare Service Provision. *Asian Perspective*, 34(3), 165-190: Lynne Rienner Publisher.
- Silvia, Chris. (2011). Collaborative Governance Concepts for Successful Network Leadership. *State and Local Government Review*. Vol. 43 (1), hlm, 66-71.
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik* (5).
- Wang, H., Ran, B., & Wang, H. (2021). Network governance and collaborative

governance : a thematic analysis on their similarities , differences , and entanglements. *Public Management Review*, 00(00), 1–25. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389>.

Wicaksono, A. (2019). Kolaborasi Multi Aktor dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4, 111–125. <https://doi.org/10.25077/jakp>.

Skripsi

Alvion, Z. (2022). *collaborative governance dalam pengembangan kota layak anak di kota batu*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Dimas, Laquito. 2016. “Collaborative Gvernance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo).” universitas Airlangga.

Fajri, M. (2018). *Collaborative Governance dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Tahun 2017(studi pada pemangku kebijakan melalui dinas perumahan dan kawasan permukiman kota Malang , bank Rakyat Indonesia dan masyarakat dalam forum group discussion (FGD)*. Universitas Brawijaya.

Fitriana, K. N., & Nip, M. P. A. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Gerakan Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta

Florentin, S., Talaubun, J., Masgiter, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Hasanuddin, U. (2022). *Collaborative Governance dalam Pengendalian Distrik Nukenjerai Kabupaten Merauke*. Universitas Hasanudin.

Latu, F. A. (2022). *Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Stunting Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Nusa Cendana.

Nainggolan, Ovan Dyka P. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pldana Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002.” universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Undang - Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014

Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tingkat Kota, Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2021

Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial

